

Ribuan Guru Madrasah Belum Tersertifikasi

Kemenag: Kewenangan Pemerintah Pusat

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Ribuan guru madrasah honoror di bawah naungan

Kemenag Sumenep belum sertifikasi. Dari 12 ribu guru, baru 3.406 guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. "Dari 12 ribu orang (guru) di bawah binaan kami, ada 3.406 guru non-PNS yang sudah proses sertifikasi dan sisanya masih tenaga honoror," kata Kasi

Pendma Kemenag Sumenep Mohammad Shadiq. Dengan demikian, insentif honoror dipasrahkan pada yayasan tempat guru tersebut mengajar. Tenaga honoror juga mendapat tunjangan dari pemerintah pusat yang cair sekali dalam setahun.

Namun berkenaan dengan tunjangan tersebut, belum ada kepastian hingga saat ini. Kemenag Sumenep tidak mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan proses pencairan tunjangan tersebut. "Kami belum tahu penyebabnya apa, tetapi perkiraan kami karena

ada pemangkasan anggaran," kata Sadiq. Mohammad Sadiq mengatakan, untuk pengajuan sertifikasi guru menjadi kebijakan pemerintah pusat. Yaitu, berdasarkan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika). Sebab itu, pihaknya tidak bisa berbuat

banyak, meskipun masih ada ribuan guru honoror nonsertifikasi. "Keberadaan sertifikat itu untuk mengukur profesionalitas guru, juga sebagai upaya mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) yang bisa didapatkan setiap bulannya," tukasnya. (sin/han)

Kunjungi Madrasah Gunakan Sistem Klasikal Pertama di Indonesia



SANTAI: Sekjen PGMNI, Departemen PB PGMNI, Ketum, Sekum PW PGMNI Sumbar Prof. Dr. H. Eka Putra Mirwan (ketua pengurus pusat PGAI), dan Pengurus PGAI di depan panti asuhan PGAI yang didirikan pada 1930 di Padang

BERSEJARAH: Bangunan madrasah klasikal yang didirikan pada 1909.



SUMBAR, Jawa Pos Radar Madura – Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) berkunjung ke Madrasah Adabiyah atau Adabiyah School. Madrasah ini diyakini sebagai madrasah tertua yang menggunakan sistem klasikal atau kelas. Sekretaris Jendral (Sekjend) PB PGMNI Badruddin menjelaskan, madrasah tersebut didirikan pada 1909 oleh Dr Syech Abdullah Achmad di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). "Alhamdulillah kita berdiri (berkunjung) di titik nol, madrasah di Indonesia, di tempat berdirinya madrasah pertama, madrasah tertua di Indonesia," kata pria yg akrab disapa Kang Badru itu, Kamis (21/7). Dijelaskan, di titik nol inilah pergerakan persatuan guru madrasah terbentuk, yaitu berdirinya Persoetoean Goeroe-Goeroe Agama Islam (PGAI) yang didirikan pada 1920 oleh Dr Abdullah Achmad dan yang

lainnya. "Semoga menjadi spirit pergerakan PGMNI untuk mencapai tujuan organisasi," ungkapnya. Berdasarkan sejarah, madrasah ini beroperasi sampai tahun 1914. Kemudian, diubah menjadi IIIS Adabiyah pada 1915 yang merupakan IIIS pertama di Minangkabau yang memasukkan pelajaran agama Islam dalam pengajarannya. "Sejatinnya, jauh sebelum Ki Hadjar Dewantara terjun di bidang pendidikan dan mendirikan lembaga Taman Siswa, sudah tersebar di Nusantara lembaga-lembaga pendidikan Islam," ungkapnya. Pada awal abad ke-20, madrasah-madrasah dengan sistem berkelas (klasikal) mulai muncul di Indonesia. Menurut penelitian Mahmud Yunus, lanjut Badru, pendidikan Islam kali pertama sekolah yang memiliki kelas dan memakai bangku, meja, dan papan tulis adalah Madrasah Adabiyah (Adabiyah School). (sin/han)

Resah, Banyak Oknum Wartawan Imla

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah guru di lingkungan madrasah resah dengan maraknya oknum wartawan dan LSM yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Sebab, sering kali oknum wartawan datang ke madrasah hanya untuk mencari uang. Padahal, kondisi keuangan madrasah sangat memprihatinkan. Khususnya soal anggaran.

Selama ini banyak madrasah yang hanya mengandalkan sumbangan siswa untuk keperluan operasional. "Kami sangat resah dengan oknum- oknum wartawan yang kerjanya hanya gitu-gitu," kata Salim, salah satu guru di Pamekasan, Kamis (21/7). Hal yang memprihatinkan, lanjut Salim, banyak media yang dibawa oknum wartawan itu tidak jelas. Meskpun

namanya ada, tapi karya jurnalistiknya tidak jelas. Nama media dan kartu identitas hanya dijadikan label untuk meraup keuntungan. "Bahkan, tidak sedikit yang saya temui mereka berstatus sebagai wartawan imla. Artinya, untuk menulis berita yang baik harus didekte," ujarnya. Sementara itu, Ketua PWI Pamekasan Moh. Tabri meminta agar wartawan

berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Sebab, jika tidak, maka hal itu akan mencederai profesionalitas wartawan. Dia juga mendukung jika ada oknum wartawan melakukan upaya pemerasan untuk melapor kepada aparat kepolisian. "Saya mengapresiasi aparat kepolisian yang beberapa hari lalu melakukan OTT terhadap oknum wartawan yang melakukan dugaan pemerasan," pungkasnya. (sin/han)

KONSULTASI

Assalamualaikum wr wb

Mohon dijelaskan berkenaan dengan madrasah aliyah program keagamaan!

(Aud Solahuddin, Bojonegoro)

Wassalamualaikum wr wb

Madrasah aliyah program keagamaan itu terutang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah.

Program keagamaan di madrasah aliyah merupakan program tambahan dalam bentuk pendalaman minat keagamaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengambil peminatan keagamaan. Oleh karena itu, madrasah aliyah selaku penyelenggara program keagamaan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di madrasah aliyah pada umumnya dengan tambahan pendalaman minat keagamaan. Program keagamaan yang diselenggarakan di madrasah aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum

madrasah aliyah pada mata pelajaran keagamaan dan untuk madrasah aliyah penyelenggara program keagamaan ditambah materi pendalaman minat keagamaan dengan jumlah jam per minggu 8 jam pelajaran. Apabila alokasi beban belajar tersebut perlu tambahan, maka madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing. Pelaksanaan program keagamaan di madrasah aliyah ini diberikan selama tiga tahun pembelajaran.

Dr. Mohammad Holis, M.Si, Praktisi Pendidikan